

**EFEKTIVITAS *CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY*  
DALAM Mendukung PERENCANAN PEMBANGUNAN  
DI KOTA BATAM (STUDI KASUS PT B'RIGHT PLN  
KOTA BATAM)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**Andrean Utama Putra**

**191010039**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2023**

**EFEKTIVITAS CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY  
DALAM MENDUKUNG PERENCANAN PEMBANGUNAN  
DI KOTA BATAM (STUDI KASUS PT B'RIGHT PLN  
KOTA BATAM)**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah salah syarat  
memperoleh gelar sarjana**



**Oleh:**

**Andrean Utama Putra**

**191010039**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2023**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Andrean Utama Putra  
Npm : 191010039  
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Humaniora  
Program Studi : Administrasi Publik S-1

Menyatakan Bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan Judul:

**EFEKTIVITAS *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DALAM  
MENDUKUNG PERENCANAN PEMBANGUNAN DI KOTA BATAM  
(STUDI KASUS PT B'RIGHT PLN KOTA BATAM)**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi saya ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah dituliskan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan Daftar Pustaka.

Apabila ternyata didalam skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan skripsi yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 20 Januari 2023

  
Andrean Utama Putra  
191010039

**EFEKTIVITAS CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY  
DALAM MENDUKUNG PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DIKOTA BATAM (STUDI KASUS PT B'RIGHT PLN  
KOTA BATAM)**

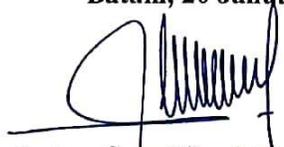
**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh:  
Andrean Utama Putra  
191010039**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal  
Seperti tertera di bawah ini**

**Batam, 20 Januari 2023**

  
**Lubna Salsabila, S.IP., M.I.P. MPA**  
**Pembimbing**



## ABSTRAK

Kontribusi perusahaan terhadap perencanaan pembangunan dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan yang disebut juga dengan *corporate social responsibility (CSR)*. Program ini merupakan konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang paling populer saat ini, dimana perusahaan berkontribusi secara sukarela bisnis untuk pembangunan yang berkelanjutan. Tugas pemerintah kota Batam adalah penghubung antara perusahaan dan masyarakat atau kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan. Pemerintah kota Batam mengajak kepada swasta, perbankan, badan usaha milik negara (BUMN) dan serta badan usaha milik daerah (BUMD) serta bidang usaha lainnya di kota Batam melalui dana *corporate social responsibility (CSR)* agar dapat bersinergi dan berkontribusi secara langsung dalam pembangunan berkelanjutan di kota Batam. Kebijakan tentang tanggung jawab sosial perusahaan diatur di tingkat daerah yaitu peraturan daerah kota Batam nomor 2 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial perusahaan; walikota Batam nomor 18 tahun 2017 tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan; walikota Batam nomor 18 tahun 2017 tentang pelaksanaan tanggung jawab jawab. PT B'right PLN Batam menyadari pentingnya melaksanakan program tanggung jawab sosial bagi masyarakat dan lingkungan sekitar mereka; dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap dunia usaha akan semakin kuat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas program CSR yang dilaksanakan oleh PT B'right PLN Batam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptor kualitatif, dimana deskriptor kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan suatu fenomena secara utuh melalui pengumpulan data. Menurut Nugroho (2012), indikator “lima tepat” efektivitas implementasi kebijakan digunakan dalam penelitian ini. PT. B'right PLN Batam melaksanakan CSR-nya dalam bentuk 7 program peduli, dan program ini dianggap berhasil karena dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, peningkatan ekonomi, dan lingkungan sekitar.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial, Perencanaan Pembangunan, Efektivitas

## ABSTRACT

The company's contribution to development planning is carried out through a corporate social responsibility (CSR) program, also known as corporate social responsibility (CSR). This program is the most popular concept of corporate social responsibility today, in which companies voluntarily contribute to business for sustainable development. The task of the Batam city government is to liaise between the company and the community or community groups who need assistance. The government of the city of Batam invites the private sector, banking, state-owned enterprises (BUMN) and regionally owned enterprises (BUMD) as well as other business fields in the city of Batam through corporate social responsibility (CSR) funds so that they can synergize and contribute directly to development. sustainability in the city of Batam. Policies regarding corporate social responsibility are regulated at the regional level, namely Batam city regional regulation number 2 of 2012 concerning corporate social responsibility; mayor of Batam number 18 of 2017 regarding the implementation of corporate social responsibility; mayor of Batam number 18 of 2017 concerning implementation of responsibilities. PT B'right PLN Batam realizes how important it is to carry out social responsibility programs for the community and the environment around them; thus, public trust in the business world will be stronger. The purpose of this study is to analyze and describe the effectiveness of the CSR program implemented by PT B'right PLN Batam. This study uses a qualitative descriptor method, where qualitative descriptors are used to describe a phenomenon through data collection. According to Nugroho (2012), the "five right" indicator of the effectiveness of policy implementation is used in this study. PT. B'right PLN Batam implements its CSR in the form of 7 caring programs, and these programs are considered successful because they can improve society, the economy, and the surrounding environment.

Keywords: Social Responsibility, Development Planning, Effectiveness

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim* dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi sarjana (S1) di Universitas Putera Batam, Program Studi Administrasi Negara.

Skripsi ini jauh dari sempurna, seperti yang disadari oleh penulis. Oleh karena itu, Penulis akan selalu menerima kritik, saran dan ide yang membangun. Terlepas dari kendala yang ada, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Putera Batam Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom
3. Plt. Ketua Program Studi Administrasi Negara Bapak Dr. Karol Teovani Lodan, S.AP., M.AP.
4. Ibu Lubna Salsabila, S.IP., M.I.P., MPA. selaku pembimbing skripsi penulis pada Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam Bapak Timbul Dompok, S.E., M.Si. Bapak Aqil Teguh Fathani, S.IP., M.IP. dan Ibu Etika Khairina, S.Sos., M.I.P. yang telah memberikan ilmunya dan pengalaman baru bagi penulis.
6. Kepada Seluruh Dosen dan Staff Universitas Putera Batam
7. Kepada Bapak Agus Subekti selaku Executive Vice President Human Capital & General Affair dan Bapak bapak Irfan Fikri selaku HRD PT. B'right PLN Batam yang telah memberikan izin bagi peneliti
8. Bapak suprianto selaku Manager of CSR PT. B'right PLN Batam, Bapak Yoga Perdana selaku Officer CSR PT. Bright PLN Batam
9. Kepada semua Narasumber yang tidak dapat disebutkan sat persatu
10. Kepada Orang tua yang selalu penulis banggakan Bapak Ramadhan Husni Dan Ibu Nita dan adik dari penulis Fareza, Yuriko, Keysha yang penulis sayangi, yang selalu memberikan support kepada penulis dan doa yang tiada hentinya kepada seluruh Keluarga Besar Penulis

11. Kepada Teman-Teman Seperjuangan di Univeristas Putera Batam khususnya di Program Studi Administrasi Negara Angkatan 2019 yang telah memberikan semangat, motivasi dan saran bagi penulis.
12. Kepada Senior dan Alumni Administrasi Negara yang telah memberi motivasi, informasi, pengalaman dan bantuannya
13. Kepada Area Manager dan Restaurant Manager, dan seluruh staff KFC batam centre yang telah mengizinkan penulis untuk bekerja sembari Berkuliah di Univeristas Putera Batam
14. Kepada sahabat terdekat dan seperjuangan ilham, farhan, astri, jeje, rafli, ruben, husein, herdin, akbar, rahman denty, rani, bima, badrun, fizar, alfon nanda, shinta, yulia, melati, wiwik
15. Kepada seluruh teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu

Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan dan selalu menyampaikan hidayah serta taufik-Nya, Amiin



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>xiv</b>
1.1 Latar Belakang.....	1-4
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Batasan Masalah .....	4
1.4 Rumusan Masalah.....	4
1.5 Tujuan Penelitian.....	5
1.6 Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1 Kajian Teori.....	7
2.1.1 Kebijakan Publik .....	7
2.1.2 Efektivitas Implementasi Kebijakan .....	8
2.1.3 Perencanaan Pembangunan Daerah .....	13
2.1.4 <i>Corporate Sosial Responsibility (CSR)</i> .....	16
2.2 Penelitian Terdahulu.....	27
2.3 Kerangka Berpikir .....	34
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	40
3.2 Sifat Penelitian .....	40

3.3 Lokasi dan Jadwal Penelitian .....	41
3.4 Sumber Data .....	41
3.5 Metode Pengumpulan Data .....	43
3.6 Definisi Operasional Variabel Penelitian .....	43
3.7 Metode Analisis Data .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN &amp; PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	47
4.1.1 Gambaran Umum PT. B;right PLN Batam .....	47
4.2 Pembahasan .....	55
4.2.1 Pelaksanaan <i>Corporate Sosial Responsibility</i> .....	55
4.2.2 Faktor yang mempengaruhi program CSR PLN Batam.....	58
4.2.3 Integrasi CSR dan perencanaan pembangunan kota Batam.....	61
4.2.4 Efektivitas Program <i>Corporate Sosial</i> .....	62
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>77</b>
5.1 Kesimpulan .....	77
5.2 Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>87</b>
Lampiran 1: Pendukung Penelitian .....	87
Lampiran 2: Pedoman Wawancara .....	90
Lampiran 3: Daftar Riwayat Hidup.....	92
Lampiran 4: Surat Keterangan Penelitian .....	93

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. 1 Kegiatan Peduli Lingkungan PT. bright PLN.....	3
Gambar 2. 1. Gradasi Perencanaan CSR .....	18
Gambar 4. 1. Sejarah Dan Perkembangan Perusahaan .....	43
Gambar 4. 2. Struktur Organisasi PT. B.right PLN Batam.....	47
Gambar 4. 3. Struktur Grup Perusahaan .....	48
Gambar 4. 4. Pemasangan Listrik Pada Daerah Perbatasan.....	52
Gambar 4. 5. Penyerahan Program Bantuan Hewan Qurban.....	54
Gambar 4. 6 Pemangku Kepentingan PLN .....	62
Gambar 4. 7 Tujuh (7) Subjek Inti Pelaksanaan CSR.....	66
Gambar 4. 8 Integrasi Program CSR dengan SDGs .....	67
Gambar 4. 9 Kegiatan Penanaman 5000 Mangrove.....	69

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3. 1. Jadwal Penelitian.....	37
Tabel 4. 1. Penyebaran MPP 500 MW Milik Bright PLN Batam .....	46
Tabel 4. 2. Realisasi Kegiatan CSR di Kota Batam Oleh PT. PLN Bright.....	53
Tabel 4. 3. Pemetaan Kepentingan Pemangku Kepentingan .....	63
Tabel 4. 4. RJP PT PLN 2020-2024.....	67



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kontribusi perusahaan dalam perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan cara kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau yang sering kita kenal dengan istilah *Corporate sosial responsibility (CSR)*. Diantara kelompok istilah dari tanggung jawab sosial perusahaan yang sering dilihat saat ini adalah bahwa kontribusi secara sukarela perusahaan untuk pembangunan keberlanjutan” (Lamarche & Bodet, 2018). Dalam hal ini perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban untuk melaksanakan program tanggung jawab kepada masyarakat melalui program-program kemitraan, namun juga untuk memastikan dampak dan manfaat yang didapatkan masyarakat melalui program itu berkelanjutan (*sustainability*).

Keberadaan suatu perusahaan di antara masyarakat umum, ada perspektif positif dan negatif yang bisa diungkapkan. Di satu sisi, perusahaan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, namun di sisi lain, masyarakat juga akan mengalami gesekan dari aktivitas bisnis tersebut (Susanto & Subekti, 2013). Tujuan utama yang dimiliki bersama oleh semua perusahaan adalah untuk menentukan bagaimana setiap organisasi dapat memaksimalkan keuntungannya (Michael et al., 2019). Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus senantiasa mengatasi masalah sosial dan lingkungan yang muncul sebagai akibat dari operasi atau keputusan ekonominya, karena praktik konsumsi perusahaan berpotensi memperburuk masalah lingkungan, terutama di antara masyarakat yang tinggal di

sekitarnya (Harahap, 2010; Palacios-Manzano et al., 2021). Kegiatan *corporate sosial responsibility (CSR)* juga diartikan sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR. Dalam implementasinya, *corporate sosial responsibility (CSR)* pada tingkat daerah diatur dalam Peraturan daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Peraturan Walikota Batam Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dimana dalam peraturan tersebut memuat tentang program dan bidang kerja Tanggung jawab sosial perusahaan yaitu Pemberdayaan Masyarakat, Kemitraan dan Bina Lingkungan, dan Program Langsung pada Masyarakat (Gantjowati & Agustine, 2017). Dan bidang Kerja Tanggung jawab Sosial Perusahaan antara lain: Pendidikan, Kesehatan, Pendampingan Umum, Olah Raga dan Seni, Sosial Keagamaan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arah, kebijakan dan kepastian hukum atas pelaksanaan program tanggung CSR agar sesuai dengan perencanaan pembangunan di Kota Batam.

Di Kota Batam setidaknya ada beberapa perusahaan milik negara yang menjalankan CSR, diantaranya adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Perusahaan Umum Bulog Batam, Kimia Farma dan lain-lain. Dalam implementasinya kegiatan CSR dikategorikan dalam lima kategori besar, yakni ekonomi sosial dan budaya, kesehatan masyarakat, lingkungan hidup, pendidikan dan pelatihan, infrastruktur (Gantjowati & Agustine, 2017; Saha, 2019). PT PLN merupakan perusahaan yang memiliki dampak

signifikan bagi kehidupan masyarakat Indonesia karena merupakan satu-satunya perusahaan yang bergerak di bidang energi, khususnya kelistrikan. Inisiatif *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* akan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, dan khususnya masyarakat yang telah berpartisipasi dalam kegiatan CSR. Kegiatan bantuan yang diberikan oleh PT Bright PLN kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk implementasi CSR yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

Realisasi Penanaman Pohon pada Program Penghijauan		Realization of Tree Planting in Reforestation Program		
Uraian / Description	Satuan / Unit	2021	2020	2019
Jumlah pohon yang ditanam / Total Trees Planted	Pohon / Tree	431.430	135.644	152.476
Jumlah area yang ditanami pohon / Total Area Planted with Trees	Hektar / Hectare	237,92	60,74	87,97

Gambar 1. 1 Kegiatan Peduli Lingkungan PT. bright PLN

Komitmen PT Bright PLN Batam dalam melaksanakan *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* tercemin dari adanya “Pedoman CSR PT PLN Batam”. Pedoman tersebut diterjemahkan oleh PT Bright PLN dengan adanya pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan CSR yang sistematis dan berkelanjutan. Kegiatan CSR yang dilakukan diklasifikasikan dalam beberapa bentuk; (1) Peduli Sosial, (2) Peduli Pendidikan, (3) Peduli Kesehatan, (4) Peduli Lingkungan, (5) Peduli Keagamaan, (6) Peduli Seni, Budaya, dan Olahraga, (7) Peduli Kemitraan (Kharis & Mutrofin, 2019; Sulastri & Indrayani, 2019).

Komitmen pelaksanaan CSR oleh PT B’right PLN tertuang pada pelaksanaan program *corporate sosial responsibility (CSR)* yang telah dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya. Namun komitmen yang tertuang dalam pelaksanaan kegiatan

rutin belum tentu efektif dalam menjawab tujuan CSR itu sendiri. Masalah-masalah tersebut diatas membuat peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* di Kota Batam dengan mengambil judul penelitian, “**Efektivitas *Corporate Sosial Responsibility* dalam mendukung perencanaan pembangunan di kota batam (Studi Kasus PT.B’right PLN Kota Batam)**”

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka kita bisa mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam proses penerapan dan pelaksanaan program *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* oleh PT. B’right PLN batam masih belum efektif, hambatan-hambatan dalam ketersediaan dana menjadi permasalahan pelaksanaan CSR PT. B’right PLN di Kota Batam

### **1.3. Batasan Masalah**

Batasan masalah ini melihat dari beberapa identifikasi masalah yang ada salah satunya yaitu hanya akan melihat dari efektivitas dan akan berfokus pada perusahaan PT.B’right di waktu penelitian itu dilaksanakan.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas program *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* yang dilaksanakan oleh PT B'right PLN Kota Batam?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan *corporate Sosial Responsibility (CSR)* oleh PT B'right PLN Kota Batam

### **1.5. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di kemukakan di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan efektivitas program *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* yang dilaksanakan oleh PT B'right PLN Kota Batam?
2. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan program *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* oleh PT B'right PLN Kota Batam.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka ada beberapa manfaat yang bisa dirasakan yaitu :

- a. Secara teoritis penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemahaman, literatur, dan masukan bagi penelitian lain yang tertarik untuk mengkaji pelaksanaan program *Corporate sosial responsibility (CSR)* oleh perusahaan di kota batam.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kajian Teori**

##### **2.1.1 Kebijakan Publik**

Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan istilah Bahasa Inggris, yaitu *public policy*. Kata *Policy* ada yang menerjemahkan menjadi “kebijakan” (Coglianese, 2005; Considine et al., 2018; Sabatier & Mazmanian, 1979) dan ada juga yang menerjemahkan menjadi “kebijaksanaan” (Mutiarin et al., 2019). Meskipun belum ada kesepakatan bahwa *policy* digunakan istilah kebijakan. Oleh karena itu, *Public Policy* diterjemahkan menjadi kebijakan publik. Menurut Thomas R. Dye (1992), “*Public Policy is whatever the Government Choose to do or not to do*” (Kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu) (Dye, 1992). Menurut Dye (1992), apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan Tindakan pemerintah. Apabila pemerintah memilih tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijak publik yang ada tujuannya.

Menurut William N. Dunn (2017), kebijakan publik adalah suatu kumpulan gagasan yang berkaitan erat dan dikembangkan oleh suatu badan atau pejabat pemerintah dalam bidang tertentu, seperti peningkatan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, keamanan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan bidang terkait lainnya (Dunn, 2017).

Menurut Ramdhani (2017), aspek administrasi publik yang terpenting adalah kebijakan publik (Ramdhani & Ramdhani, 2017) . Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah merupakan sumber daya tak terbatas yang membantu pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan organisasi kecil dan besar, seperti negara. Karena semua proyek pembangunan nasional, proyek pekerjaan umum, dan proyek publik lainnya akan dilakukan dengan menggunakan dana publik. Sebagai langkah awal, luncurkan inisiatif atau program pemerintah.

Menurut Pasolong (2007), seiring dengan bertambahnya jumlah teknologi untuk administrasi publik yang lebih baik, administrasi publik juga berkembang (Pasolong, 2007). Disisi lain juga berpartisipasi dalam kegiatan analisis dalam kebijakan publik. Akibatnya, akan terjadi sintesis berbagai disiplin ilmu dalam satu bundel kolaborasi dalam pelayanan publik. Berdasarkan kebijakan publik, ini akan diintegrasikan dengan realitas praktis dan teoritis.

### **2.1.2 Efektivitas Implementasi Kebijakan**

Menurut Prihartono (2012), efektivitas diartikan sebagai tingkat pencapaian yang dicapai. Sasaran diartikan sebagai peristiwa atau kondisi tertentu . Selanjutnya, efisiensi perbandingan terbaik antara input dan output, juga dikenal sebagai rasio input/output. Menurut Bali dkk (2019) suatu efektifitas dapat dikatakan efektif apabila dapat menghasilkan satu keluaran (output). Suatu pekerjaan dianggap efektif jika mampu diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (Bali et al., 2019). Dengan menggunakan beberapa kriteria yang telah disebutkan, jelaslah bahwa menjalankan sebuah program juga

merupakan proses pembelajaran bagi orang yang menjalankannya. Selain itu, proses pelaksanaan program yang dilakukan oleh pemerintah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemampuan masyarakat dan juga berkembang sebagai pengabdian kepada masyarakat.

Foggia (2016) mendefinisikan efektivitas sebagai pengejaran keuntungan maksimum bagi suatu organisasi dengan cara apapun; namun, ada dua faktor yang sangat penting dalam mengejar efektivitas. Prinsip efisiensi pertama adalah membandingkan masukan, keluaran, energi, dan mengajukan argumentasi penyelesaian atau pemecahan masalah yang ekonomis (Foggia, 2016). Efek politis kedua, yakni sebagai jangka pendek usaha untuk memaksimalkan keuntungan organisasi melalui transaksi dan pertukaran yang menguntungkan dengan para anggota organisasi atau pihak luar organisasi. Avanceña dkk (2019), mengidentifikasi variabel kunci yang mempengaruhi efektivitas organisasi adalah: (1) Karakteristik organisasi, termasuk struktur dan teknologi organisasi; (2) Karakteristik lingkungan, termasuk lingkungan internal dan eksternal; (3) Karakteristik kandidat yang menitikberatkan pada keterikatan pada organisasi kerja dan prestasi kerja, (4) Pembekalan praktik manajemen (Avanceña et al., 2019).

Saat mengimplementasikan program atau melakukan proyek, perusahaan harus memperhatikan siapa yang menjalankan efek jangka panjang dalam organisasi. Secara umum, keberhasilan organisasi diukur dengan konsep efektivitas, namun terdapat banyak perbedaan di antara penggunaannya. Alasan mengapa hal ini terjadi adalah karena ada banyak tingkat penggunaan efektif yang tersedia.

Selain itu terdapat beberapa pengukuran efektivitas kebijakan publik. Bryant dan White dalam Samodra Wibawa, dkk (1994) mengusulkan beberapa kriteria selain tujuan dan target untuk dapat mengukur efektivitas implementasi program sebagai berikut : (1) Waktu pencapaian (2) Tingkat pengaruh yang digunakan. (3) Perubahan perilaku manusia. (4) Pelajaran yang diperoleh dari pelaksanaan proyek. (5) Tingkat kesadaran manusia akan kemampuan dirinya (Puspasari et al., 2018).

Selanjutnya Menurut Riant (Nugroho, 2011) pada dasarnya ada “lima tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu:

**a. Tepat Kebijakan**

Tepat kebijakan ini memiliki arti apakah kebijakan yang ada sudah berisi hal-hal yang dapat memecahkan masalah yang ingin diselesaikan. Kedua adalah apakah kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan karakteristik masalah yang tidak dapat diantisipasi. Poin ketiga, kebijakan tersebut dibentuk oleh lembaga yang memiliki kewenangan (misi kelembagaan) sesuai dengan karakteristik kebijakan tersebut.

**b. Tepat Pelaksanaan**

Pihak yang dapat melaksanakan kebijakan tidak selalu pemerintah. Ada tiga organisasi yang dapat berperan sebagai katalisator: pemerintah, pemerintah dan masyarakat/swasta, atau pelaksana kebijakan yang disebarluaskan. Kebijakan-kebijakan yang pada hakekatnya bersifat monopoli selalu disetujui oleh pemerintah. Kebijakan yang ditujukan untuk kemaslahatan rakyat banyak harus dilaksanakan oleh pemerintah bersama rakyat. Kebijakan dengan tujuan

untuk memastikan bahwa prakarsa rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh rakyat.

**c. Tepat Target**

Situasi saat ini melibatkan tiga aspek. Pertama, tujuan intervensi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan; tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain dan tidak ada keterikatan dengan intervensi lain untuk tujuan terkait. Dalam kedua kasus tersebut, target yang bersangkutan siap untuk diintervensi atau tidak. Terakhir, intervensi untuk melaksanakan kebijakan tersebut adalah baru atau telah dimodifikasi dari intervensi sebelumnya.

**d. Tepat Lingkungan**

Ada dua ekosistem yang paling penting: ekosistem kebijakan internal dan eksternal. Interaksi antara Lembaga Perumus Kebijakan dengan Lembaga Terkait membentuk Lingkungan Kebijakan. Kemudian terdapat 20 external influencer opini publik yang fokus pada pembentukan kebijakan publik, antara lain persepsi publik terhadap kebijakan publik dan implementasinya; lembaga penafsiran yang terkait dengan penafsiran Lembaga Lembaga untuk masyarakat umum, termasuk media dan media massa; kelompok penekan dan kelompok kepentingan; dan individu, seperti individu tertentu yang mampu melakukan persuasi dalam membentuk interpretasi.

### e. Tepat Proses

Tepat proses disini terdiri atas tiga proses, yaitu:

#### 1) *Policy Acceptance*

Di sini publik memahami kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.

#### 2) *Policy Adoption*

Di sini publik menerima kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.

#### 3) *Strategic Readiness*

Di sini publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, di sisi lain birokrat pelaksana siap menjadi pelaksana kebijakan.

Dengan melihat berbagai indikator keefektifan program yang disampaikan oleh para ahli/pakar di atas, maka penulis memutuskan untuk menggunakan pendapat Nugroho (2012) karena lebih tepat, lebih handal, dan lebih mampu mencapai tujuan peningkatan dan melihat efektivitas tanggung jawab sosial perusahaan dalam proses perencanaan pembangunan Kota Batam dalam hal ini yang dilaksanakan PT B'right PLN Batam. Asumsi yang mendasari pada indikator ini adalah dapat membedakan sejumlah indikator yang sering digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan publik tertentu baik itu di dalam maupun di luar organisasi.

### **2.1.3 Perencanaan Pembangunan**

Perencanaan Pembangunan merupakan tahap awal proses. Karena pentingnya memenuhi tujuan yang harus dicapai selama konstruksi dengan dana yang tersedia dan berbagai alternatif potensial, upaya ini harus diupayakan (Weiss & Thurbon, 2021). Undang - undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional meletakkan dasar bagi Perencanaan Pembangunan Indonesia. Perencanaan pembangunan dalam peraturan ini dapat dilihat sebagai upaya/tindakan untuk kedepannya. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah kemudian menerapkan hal-hal tersebut di atas (BAPPENAS, 2005).

Kemudian, berbagai definisi mengenai pengertian perencanaan pembangunan juga disebutkan oleh para akademisi. Pamungkas (2018) memberikan pengertian istilah "rencana" untuk proses pembangunan sebagai suatu konsep yang mencakup dua aspek: yang pertama adalah proses bangunan itu sendiri, dan yang kedua adalah substansi dari proses pembangunan itu sendiri (Pamungkas, 2018). Proses negosiasi ulang persyaratan proyek bangunan terkait dengan kegiatan yang dilakukan, serta waktu dan orang-orang yang terlibat dalam proses tersebut. Namun, substansi proyek konstruksi difokuskan pada apa produk akhir dari proyek konstruksi tersebut, serta isu-isu strategis yang belum diputuskan.

Lebih lanjut, Pamungkas (2018) memaparkan bahwa proses perencanaan pembangunan sebagai pengganti sesuatu yang lain atau sebagai pembenaran sesuatu yang lain berdasarkan data dan fakta yang akan digunakan sebagai blok bangunan untuk melakukan berbagai macam prakarsa atau kegiatan masyarakat, baik yang memiliki fokus utama materi maupun non materi, guna mencapai suatu tujuan yang lebih berhasil (Pamungkas, 2018). Belakangan, istilah "perencanaan pembangunan daerah" digunakan dalam konteks negara. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah digambarkan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk mengubah arah perkembangan anggota masyarakat tertentu, pemerintah, dan lingkungan setempat di suatu daerah. Proses ini melibatkan penggunaan atau pemanfaatan berbagai sumber daya yang tersedia, dan harus memiliki fokus yang jelas pada prioritas utamanya.

Menurut beberapa teori tentang perencanaan pembangunan yang dimaksud, perencanaan pembangunan dalam kajian ini terbagi menjadi dua kategori yaitu proses dan isi atau substansi (Akbar et al., 2020; Hasan et al., 2019; Reza Hariyadi, 2021). Kualitas proses terkait dengan bagaimana rencana bangunan tertentu diberhentikan, serta individu yang terlibat dalam proses tersebut (Akbar et al., 2020). Serta bagaimana artikulasi kepentingan diekstraksi dan didiagnosis selama proses pembangunan. Untuk tujuan pendefinisian tempat, suatu tempat didefinisikan sebagai telah selesai pembangunannya sampai pada suatu titik di mana ia memiliki ciri-ciri tempat sasaran, atau satu tempat tertentu (Dariah et al., 2019). Sebaliknya, dari segi

estetika atau substansi, akan terlihat jelas apa agenda perencanaan dan pembangunan Kawasan (Reza Hariyadi, 2021). Prioritas per-isu yang disebarluaskan akan menghambat upaya pemerintah daerah untuk mengatasi penderitaan rakyat secara keseluruhan.

Perencanaan Pembangunan merupakan langkah kritis dan penting dalam proses pembangunan, sehingga langkah ini harus diselesaikan secara menyeluruh dengan bantuan data statistik yang akurat. Tujuan dan prinsip yang akan diwujudkan dalam masa transisi ke bawah perlu difokuskan karena perencanaan pembangunan akan menunjukkan arah pembangunan daerah. Selain proyek perencanaan pembangunan yang biasa menggunakan APBD yang dilaksanakan melalui mekanisme Musrenbang, terdapat juga proyek perencanaan pembangunan yang tidak menggunakan APBD, seperti yang dilakukan oleh badan usaha swasta atau BUMN menggunakan program dana CSR *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Mekanisme perencanaan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dari masyarakat tingkat bawah (desa/kelurahan) dengan mensinergikan perencanaan pembangunan daerah yang dibiayai oleh APBD (Sulaiman et al., 2020).

Sinergisitas perencanaan pembangunan daerah yang dibiayai dari berbagai sumber menjadi mutlak dilaksanakan bila tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai dapat terwujud, baik antar sektor maupun antar waktu. Sinergisitas pembangunan antarsektor merupakan keselarasan program pembangunan antarsektor, tidak ada tumpang tindih dalam program pembangunan, tetapi justru saling mendukung (Setiawan, 2015). Di sisi lain,

pembangunan sinergis lintas waktu mengacu pada kelanjutan program pembangunan (pembangunan berkelanjutan) dari satu periode ke periode berikutnya hingga tujuan dan hasil yang diinginkan tercapai.

#### **2.1.4 *Corporate Sosial Responsibility (CSR)***

Menurut Bahasa, *Corporate Sosial Responsibility* diartikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Undang undang nomor 40 tahun 2007 tentang perusahaan terbatas memilih menggunakan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk menjabarkan dalam peraturan tersebut. Pada saat ini belum adanya kesatuan Bahasa terhadap istilah CSR namun secara konseptual semua nya memiliki kesamaan makna (Putra, 2021).

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) merupakan komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi jangka panjang dalam masalah tertentu di masyarakat atau lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik (Nayenggita et al., 2019; Wati & SE, 2019). Menurut Nayenggita dkk (2019) *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah komitmen perusahaan atau dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan berfokus pada keseimbangan antara perhatian pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (Nayenggita et al., 2019). Kompleksitas masalah sosial yang semakin rumit dalam dekade terakhir dan pelaksanaan desentralisasi telah menetapkan CSR sebagai konsep yang diharapkan dapat memberikan alternatif terobosan baru dalam pemberdayaan masyarakat miskin (Sumanti, 2020).

Beberapa konsep tentang *Corporate Social Responsibility* dapat dijelaskan dengan merunut pendapat-pendapat dari beberapa ahli yang didasari oleh beberapa penelitian terhadap kegiatan perusahaan. Salah satu konsep menyebutkan tentang *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas (Inekwe et al., 2020). Dari sini tersirat suatu pernyataan bahwa sasaran usaha adalah komunitas secara lebih luas menjadi inti dari CSR, dijelaskan bahwa anggota masyarakat yang lebih luas termasuk didalamnya adalah karyawan perusahaan, anggota keluarga karyawan serta masyarakat yang menjadi lingkungan sosial dari perusahaan itu sendiri (Putra, 2021).

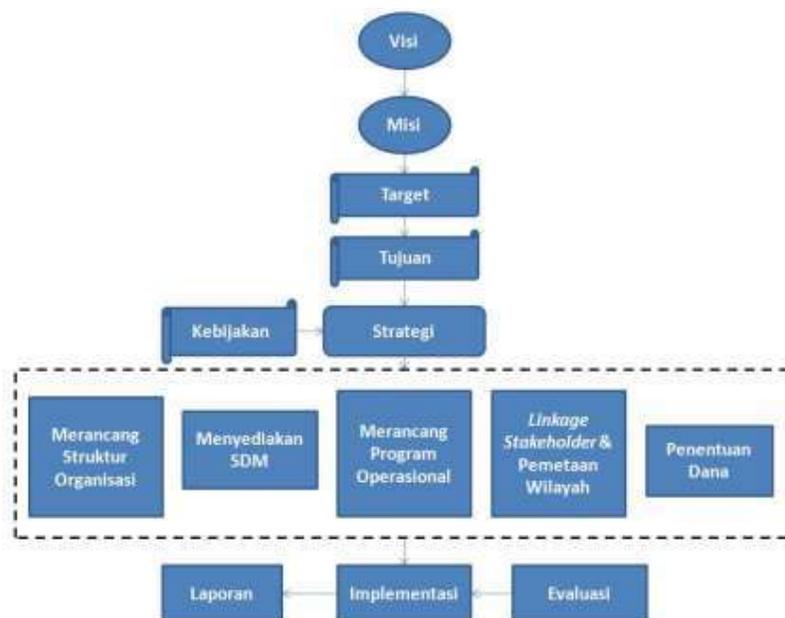
Menurut The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) dinyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikutan komunitas-komunitas setempat (lokal) dan masyarakat secara keseluruhan, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan (World Business Council for Sustainable Development, 2002). Dari pernyataan ini, terlihat adanya usaha untuk ikut terlibat dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan sehingga dengan demikian kemandirian sebuah masyarakat menjadi tolok ukur keberhasilan sebuah usaha.

Dari pendapat kedua dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas hidup berarti manusia memiliki kemampuan untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang mungkin timbul, menikmati dan memanfaatkan lingkungannya, termasuk perubahan yang mungkin terjadi yang bermanfaat dan menguntungkan. berbahaya. Atau, dengan istilah lain itu adalah metode dimana bisnis menyesuaikan prosedur bisnisnya untuk menghasilkan dampak sosial yang positif. Dengan memiliki fokus sosial yang begitu kuat, bisnis tidak hanya dipengaruhi oleh prinsip persetujuan donor saja, tetapi juga oleh cakupan prinsip persetujuan donor yang sangat luas dan kurangnya elemen statis dan pasif, yang hanya disediakan oleh bisnis. Namun, ini sebenarnya masalah tanggung jawab dan kewajiban bersama di antara para pihak.

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan mendorong kerjasama antara pemerintah, badan pengurus masyarakat, dan komunitas keagamaan (lokal). Pernyataan ini sama sekali tidak pasif dan statis. Kesepakatan ini merupakan tanggung jawab yang disadari secara sosial di antara para pemangku kepentingan. (Nayenggita et al., 2019; Rahmadani et al., 2018). Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dapat beraneka ragam dari yang bersifat ke dalam perusahaan yaitu mengembangkan kapasitas karyawannya, keluarga karyawannya serta stakeholder perusahaan sampai pada kegiatan yang bersifat ke luar perusahaan seperti pengembangan masyarakat (*community development*), dari yang bernuansa abstrak sampai pada bentuk yang konkrit. Salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang ditujukan untuk keadaan di luar perusahaan adalah pengembangan masyarakat yang

lebih dikenal sebagai *Community Development*. *Community Development* adalah kegiatan pembangunan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya (Budimanta, 2002).(Metafurry, n.d.)

CSR sebagaimana kegiatan lain dalam praktiknya direncanakan terlebih dahulu, kemudian dilaksanakan atau diimplementasikan, dan pada akhirnya dievaluasi. (Hadi & Udin, 2020) merumuskan diagram yang menggambarkan tahapan perencanaan, evaluasi, dan implementasi CSR sebagaimana dalam gambar berikut;



Gambar 2. 1. Gradasi Perencanaan CSR

Sumber: Nor Hadi (2014)

### **1. Menetapkan Visi**

Visi adalah filosofi operasional yang berlaku untuk entitas apa pun, apa pun jenisnya. Sebagai landasan filosofis, visi menjadi nilai inti dari setiap kegiatan, sehingga mempengaruhi berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawab entitas (organisasi). Agar berdampak pada masyarakat dan lingkungan, praktik sosial harus didasarkan pada landasan kuat yang ditetapkan sebagai pekerjaan. Dalam hal ini, sinkronisasi visi perusahaan menjadi sangat penting. Visi ini memberikan peluang bagi pemilik bisnis untuk mengembangkan kode etik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

### **2. Menetapkan Misi**

Misi adalah versi visi yang lebih operasional. Akibatnya, misi perusahaan sosial adalah untuk memberi tahu pemangku kepentingan tentang siapa perusahaan itu, filosofinya, dan apa yang dilakukannya. Dalam hal ini, misinya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan aspek sosial dari operasi perusahaan. Singkatnya, misi adalah serangkaian tujuan yang akan memandu bagaimana perusahaan beroperasi.

### **3. Menetapkan Tujuan**

Tujuan merupakan scope hasil akhir (*result*) yang dicapai perusahaan sebagaimana tertuang dalam perencanaan. Penentuan tujuan penting dalam banyak aktivitas, agar penentuan tujuan secara akurat dapat menjadi bingkai (*frame*) segala tindakan yang akan dilakukan, dan sekaligus dapat dijadikan standar ketercapaian suatu aktivitas. Tujuan merumuskan apa yang akan

diselesaikan perusahaan dalam keberpihakan terhadap stakeholders, kapan akan diselesaikan, dan bagaimana mengukur secara akurat suatu kegiatan dilakukan

#### **4. Menetapkan Target**

Target adalah suatu batas dan keinginan untuk mencapai jangka pendek dari tujuan yang telah ditetapkan ini. Target harus ditingkatkan karena merupakan sarana untuk memastikan pelaksanaan dan evaluasi tugas dalam jangka waktu yang lebih lama. Dengan mengingat tujuan, mereka yang melakukan aksi sosial memiliki rencana saat menjalankan sebuah program.

#### **5. Mempertimbangkan Kebijakan**

Kebijakan merupakan pedoman untuk pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan. Kebijakan adalah dasar yang diambil pimpinan dan menjadi orientasi suatu program seperti bentuk, tipe, sasaran, dan lain-lain. Kebijakan akan menentukan dalam merumuskan strategi tanggung jawab sosial sekaligus sebagai panduan aktivitas yang dimunculkan. Wibisono dalam (Hadi 2014) menyebutkan beberapa jenis kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha ketika melakukan kegiatan CSR, antara lain: tanggung jawab sosial perusahaan sebagai investasi sosial perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan sebagai strategi bisnis perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan sebagai upaya untuk memperoleh *license to operate*, tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bagian dari *Risk Management*.

#### **6. Menetapkan Strategi**

Namun, strategi tersebut harus difokuskan pada arah kegiatan CSR yang akan dilakukan. Strategi ini merupakan sarana untuk menentukan visi, misi, dan tugas sosial yang akan dijalankan. Dalam banyak kasus, CSR perusahaan dilakukan dengan fokus pada beberapa strategi, seperti:

- a) **Public Relation.** Strategi ini diterapkan dalam proses membangun dan mengedukasi masyarakat umum tentang identitas perusahaan, pemasaran, pengembangan produk, pembukaan toko, atau peningkatan keuntungan bisnis.
- b) **Defensive Strategy.** Strategi ini diterapkan dalam rangka meringankan atau mengurangi dampak negatif terhadap persepsi masyarakat terhadap perusahaan. Strategi ini biasanya digunakan setelah ada keluhan dari pemangku kepentingan perusahaan. Upaya yang dilakukan adalah, anjuran, dan peraturan.
- c) **Community Development.** Strategi ini dilakukan dengan meluncurkan program untuk bisnis terdekat atau meluncurkan inisiatif bisnis yang berbeda dari hasil perusahaan. Program pengembangan masyarakat dapat dibedakan menjadi:
  - d) **Community Relation.** Hal ini dilakukan dengan melakukan kegiatan yang mendorong pemahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pemangku kepentingan. Program CSR yang menggunakan strategi ini sering terlihat di bidang filantropi (amal), pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial lainnya. Bantuan bencana alam, katarak operasi, khitanan massal, bantuan sembako, dan lain-lain.

- e) ***Community Service***. Strategi ini dimaksudkan untuk meningkatkan operasi bisnis dengan mengurangi risiko sosial atau global. Program CSR yang menggunakan strategi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan pemecahan masalah dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, dengan perusahaan hanya berperan sebagai fasilitator pemecahan masalah.
- f) ***Community Empowering***. Strategi ini memungkinkan akses CSR yang lebih besar oleh masyarakat umum untuk menentukan tujuannya. Strategi ini mengembangkan orang-orang sebagai pemimpin dan memberikan peluang.

## **7. Merancang Struktur Organisasi**

Untuk memastikan bahwa kegiatan CSR dilakukan secara serius dan berkelanjutan, harus dibentuk satu departemen yang hanya berfokus pada kegiatan perusahaan sosial. Terlihat keseriusan perusahaan yang mempekerjakan departemen tersendiri di bawah pengawasan seorang manajer yang bertanggung jawab penuh dalam mengembangkan dan melaksanakan praktik CSR. Ada perusahaan yang melakukan CSR melalui urusan umum, hubungan masyarakat, atau bahkan departemen CSR. Jenis usaha seperti ini secara rutin melakukan penilaian sosial yang terprogram, holistik, dan menyeluruh.

## **8. Merancang Program Operasional**

Salah satu kegiatan sosial yang terkait dengan krusialnya adalah kecepatan pelaksanaan kegiatan dan efektivitas pelaksanaannya dari sisi manfaat bagi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta koherensi operasi bisnis. Langkah pertama dalam mengurangi praktik CSR yang tidak efektif adalah dengan mengidentifikasi masalah yang perlu ditangani, serta kebutuhan pemangku kepentingan. Secara lebih spesifik, program CSR dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain, namun tidak terbatas pada: (1) Berbasis sumber daya local (2) Berbasis pada pemberdayaan masyarakat (3) Mengutamakan program keberlanjutan (4) Dibuat berdasarkan perencanaan secara partisipatif yang didahului dengan nilai kebutuhan (5) Linked dengan *core business* perusahaan (6) Fokus pada bidang prioritas

## **9. Menyediakan Sumber Daya Manusia**

Penyiapan sumber daya manusia yang handal merupakan tahapan keberhasilan pelaksanaan tanggung jawab sosial. *Human capital* akan dikaitkan dengan efisiensi, evaluasi, dan implementasi CSR di tahun-tahun berikutnya.

## **10. Lingkage Stakeholder & Pemetaan Wilayah**

Sangat penting untuk membangun jaringan dan hubungan dengan para pemangku kepentingan untuk memahami berbagai perspektif yang sedang

dibahas dalam konteks. Pembayaran ini berguna untuk mengurangi inefisiensi program sehingga efisiensi moneter dapat terwujud. Acara ini juga diakui sebagai sesi brainstorming dengan publik dalam bentuk penelitian dan berbagai kegiatan yang relevan dengan kondisi publik saat ini. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan.

#### **11. Menentukan Sumber Dana**

Kualitas praktik CSR ditentukan tidak hanya oleh strategi dan kemampuan SDM, tetapi juga oleh ketersediaan sumber dan data. Menurut UU No. 40 Tahun 2007, pelaku usaha di tanah BUMN dan usaha yang beroperasi di tanah BUMN harus menyisihkan hingga tiga persen (3%) dari keuntungannya untuk proyek lingkungan dan masyarakat. Ini harus dimasukkan dalam laporan tahunan.

#### **12. Implementasi**

Berdasarkan data tersebut, tidak ada formula yang dapat digunakan untuk menentukan cita-cita ideal pelaksanaan CSR. Ada beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan ketika menerapkan praktik CSR, antara lain:

- a. Program dengan sentralisasi.

Praktik CSR berfokus pada organisasi, di mana organisasi mengembangkan program, menyempurnakan strategi, dan menjalankan program yang telah disetujui. Program sentralistik dapat bekerja sama

dengan organisasi lain seperti event organizer, LSM, pemerintah, lembaga pendidikan, dan lain-lain selama mereka memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama.

b. Program desentralisasi.

Perusahaan berperan sebagai pendukung kegiatan pada program ini (media pendukung). Perencanaan, strategi, tujuan, dan target pelaksanaan yang ditentukan oleh pihak lain. Perusahaan memiliki posisi sebagai pendukung, baik dari segi uang, sponsor, maupun materi.

c. Sebuah program dari jenis campuran.

Program ini menggunakan pola memadukan antara sentralistik dan desentralistik, sehingga lebih cocok untuk program pengembangan masyarakat. Program comdev membantu dalam pengembangan, implementasi, dan pelaksanaan proyek yang dilakukan bekerja sama dengan penerima manfaat.

### **13. Laporan**

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 mewajibkan perusahaan untuk tidak hanya melaksanakan tanggung jawab sosial/CSR, tetapi juga kewajiban melaporkan pelaksanaan CSR. Laporan CSR merupakan laporan CSR yang dilakukan perusahaan baik terkait dengan perhatian masalah dampak sosial atau lingkungan. Laporan ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan laporan tahunan yang dibahas oleh Rapat Umum Pemegang Saham di depan sidang Rapat Umum Pemegang Saham

(RUPS). Laporan ini mencakup program sosial dan bisnis yang telah dilaksanakan sepanjang tahun.

#### 14. Evaluasi

Evaluasi dan *Monitoring* Tingkat Ketercapaian Kinerja yang telah dilakukan dalam rangka perbaikan di masa depan, sekaligus menentukan tingkat ketercapaian kinerja yang telah dilakukan. Melalui evaluasi dapat ditentukan apakah perlu adanya perbaikan, khususnya bagi pelaku usaha yang melakukan CSR dalam jangka waktu yang lama.

#### 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Metode	Temuan
1	Adabi, Nu'man, and S. Ag Rizka.  (2021)	Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Pada Perusahaan	Penelitian kualitatif Deskriptif	1. Kewajiban melaksanakan CSR sudah diatur dalam pasal 74 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial

		BUMN (Studi Pada PT WIKA Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin dan Gas)		dan Lingkungan Perseroan Terbatas 2. CSR yang dilaksanakan oleh Proyek pembangunan PLTMG Sumbawa 50 MW telah memenuhi ketentuan beberapa pasal dari PP nomor 47 tahun 2012
2	Hamdani, Vanderson. (2021).	"Harmonisasi Pengaturan Hukum serta Implikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan pada BUMN PTPN III Persero Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-09/MBU/07/2015." Ilmu Hukum Prima (IHP) 4.2	Penelitian Kualitatif Deskriptif	1. Pada dasarnya pelaksanaan program CSR oleh PTPN III bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berada disekitar PTPN III di samping menjaga kelestarian lingkungan dan membawa manfaat bagi perkembangan perusahaan di masa mendatang

3	Disemadi, Hari Sutra, and Paramita Prananingtyas. (2020)	Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia	Penelitian Kualitatif Deskriptif	1. Kebijakan CSR merupakan strategi hukum yang digunakan dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui program-program bantuan pendidikan gratis, pelatihan pengembangan usaha lokal untuk membuka peluang usaha bagi masyarakat, serta program kepedulian berupa recruitment tenaga kerja lokal.
4	Sutriani, Hidia. (2020)	Implementasi Kegiatan Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Semen Padang	Penelitian kualitatif dan kuantitatif	1. Partisipasi masyarakat pada program CSR Semen Padang Mandiri (Kegiatan Forum Nagari) berupa program pemberdayaan untuk pengentasan kemiskinan. Sebagian besar masyarakat sekitar

				menilai baik terhadap Kegiatan Forum Nagari-PT Semen Padang, karena dirasa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
5	(Hakim, 2013)	Integrasi CSR dan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Model Baru Pelaksanaan CSR	Penelitian kualitatif	<p>1. Inisiatif CSR baru dalam model di atas dapat memberikan solusi untuk masalah CSR yang meluas di bisnis. Konflik yang masih berkecamuk di wilayah tabang dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelaksanaan program CSR merupakan indikasi masalah yang lebih dalam—tanda betapa seriusnya pelaku bisnis menjalankan komitmennya terhadap CSR.</p> <p>2. Program CSR perlu diintegrasikan ke dalam</p>

				<p>program pembangunan pemerintah secara menyeluruh agar publik dapat mengawal pelaksanaannya melalui media, swadaya, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rapat-rapat daerah.</p> <p>3. Integrasi lain yang dibahas di atas dapat meningkatkan efektivitas, ketergantungan, dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan bisnis. Menurut John Elkington (1998), seorang ahli CSR, harmoni didefinisikan sebagai hubungan antara bumi, penghuninya, dan kemanusiaan.</p>
6	Nurati, D. E. (2019).	Penerapan Program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Menciptakan	Penelitian Kualitatif	1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tim CSR merupakan pelaksana CSR, mulai

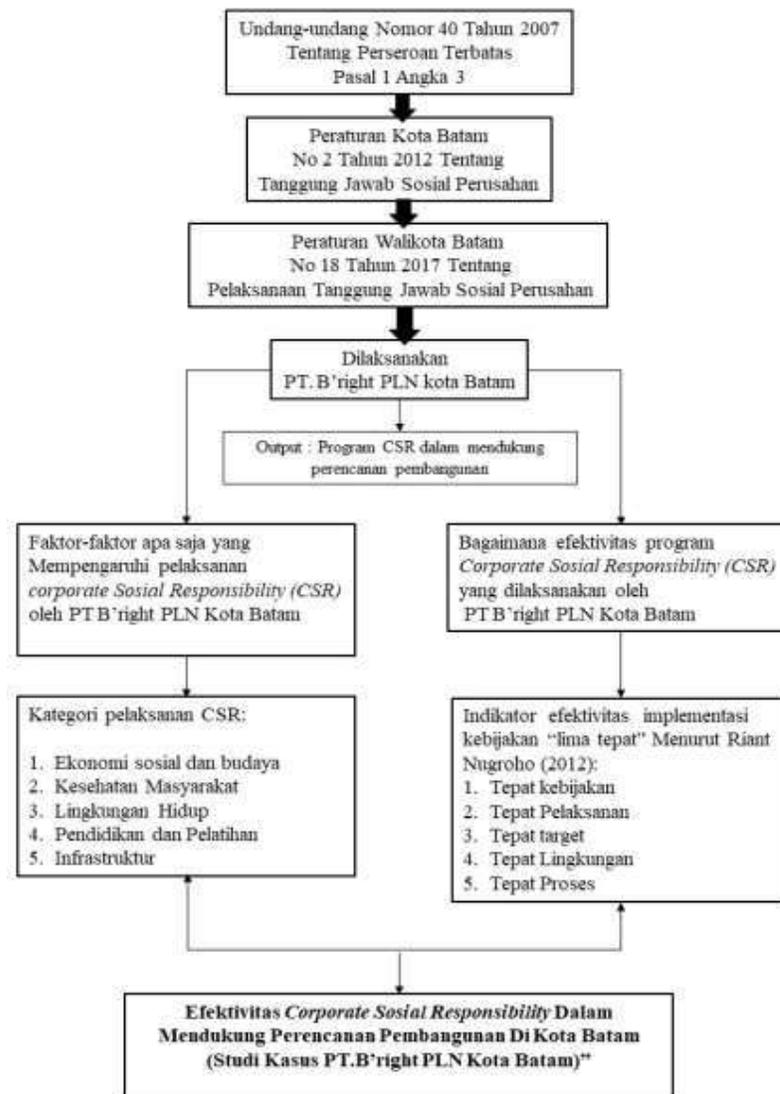
		Good Corporate Governance (GCG) pada PT. PLN (Persero) Area Surakarta.		dari menganalisa proposal permohonan yang masuk, melakukan survei, membuat perjanjian kontrak, menyerahkan bantuan, dan kemudian memberikan pendampingan atau pembinaan terkait dengan penerima CSR.
7	(Lesmana & Wibowo, 2021)	Analisis Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Pembangunan Di Kabupaten Kutai Timur (Studi Kasus Kecamatan Teluk Pandan Dan Bengalon)	Penelitian kualitatif	1. Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Kabupaten, Bantuan Keuangan Provinsi, dan Bantuan dari Perusahaan yang berbentuk <i>Community Social Responsibility</i> adalah jumlah dana pembangunan yang dapat dimanfaatkan oleh desa di Kutai Timur (CSR).

				<p>2. Masih rendahnya kapasitas SDM yang menjadi faktor kelemahan utama dalam memanfaatkan dana bantuan dari perusahaan, tetapi dukungan dari perusahaan sangat tinggi untuk pembangunan kabupaten kutai timur.</p> <p>3. Komunikasi antara pelaku bisnis dan pemerintah sangat buruk, sehingga menjadi faktor kunci dalam memanfaatkan dana perusahaan.</p>
--	--	--	--	--

Dapat dilihat bahwa penelitian terdahulu banyak yang membahas tentang bagaimana penerapan program *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* itu sendiri. Pada dasarnya pelaksanaan program CSR bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, memberikan pendampingan atau pembinaan terkait penerima CSR dan membawa manfaat bagi perkembangan perusahaan mendatang, sedangkan Penelitian saya sendiri bertujuan untuk melihat Efektivitas *corporate sosial*

*responsibility (CSR)* itu sendiri. Dimana peneliti akan melihat program realisasi *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* oleh PT.B'right PLN Batam dalam mendukung perencanaan pembangunan di kota batam, dimana efektif atau tidak nya akan di sampaikan di akhir kesimpulan kemudian di peraturan daerah muara atau tujuan CSR oleh PT.B'right PLN Batam itu diharapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan di Kota Batam.

### 2.3. Kerangka Berpikir





## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Ada empat pendekatan yang digunakan dalam penelitian menurut (Marshall & Rossman, 2014) yaitu; penelitian eksploratif, penelitian deskriptif, penelitian penjelasan, dan penelitian emansipator (Creswell, 2014) .Jenis pertama adalah penelitian eksploratif yang dilakukan di mana peneliti kurang mengetahui dan memahami kejadian tersebut. Pendekatan ini digunakan bertujuan untuk mencari wawasan baru dengan mengajukan pertanyaan dan ide untuk penelitian selanjutnya. Kedua, penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan fenomena atau keadaan yang dapat dilihat atau fenomena yang ada, baik fenomena alam maupun fenomena tidak alamiah (buatan manusia). Fenomena tersebut dapat berupa aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, dan juga perbedaan antara dua fenomena atau lebih. Pendekatan ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor atau karakteristik subjek. Ketiga, explanatory research adalah pendekatan penelitian yang akan menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih yang tidak hanya akan menunjukkan fenomena penelitian tetapi juga untuk menguji hipotesis sebab dan akibat. Selain itu, tipe keempat adalah penelitian emansipatoris yaitu pendekatan yang bertujuan untuk terlibat dalam aksi sosial seperti pemberdayaan warga negara atau publik atau sosial (Creswell, 2014) .Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang berfokus pada Efektivitas *Corporate Sosial Responsibility* Dalam Mendukung Perencanaan

Pembangunan Di Kota Batam (Studi Kasus PT. B'right PLN Kota Batam) peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif.

### **3.2. Sifat Penelitian**

Metode kualitatif dipilih sebagai metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program CSR oleh PT. B'right PLN, Kota Batam. Di mana, mengacu pada Creswell (2014), pendekatan ini digunakan untuk mencari wawasan baru melalui pemberian pertanyaan dan ide untuk penelitian lebih lanjut. itu adalah studi pendahuluan untuk memperjelas sifat yang tepat dari masalah yang akan diselesaikan. Dimana dalam penelitian ini akan dilihat faktor apa saja yang mempengaruhi proses pelaksanaan program CSR oleh PT. B'right PLN (Creswell, 2014).

### **3.3. Lokasi Dan Jadwal Penelitian**

#### **a) Lokasi**

Penelitian ini mengambil lokasi atau objek penelitian di PT. B'right PLN, Kota Batam terkait dalam proses program CSR. Penelitian ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu enam (6) bulan, dimulai sejak mulai bulan September 2022 hingga Februari 2023. Adapun proses dan juga tahapan penelitian ini akan dipetakan berdasarkan jadwal penelitian.

**b) Jadwal Penelitian**

Tabel 3. 1. Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Periode																											
		Agustus				September				Oktober				November				Desember				Januari							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Observasi Lapangan	■	■	■	■																								
2	Pembuatan Proposal Penelitian		■	■	■																								
3	Perumusan Tinjauan Pustaka		■	■	■	■	■																						
4	Pengumpulan Data							■	■	■	■																		
5	Analisis Data									■	■	■	■	■	■														
6	Penulisan Laporan Akhir													■	■	■	■	■	■	■	■								
7	Pemaparan Hasil Penelitian																					■	■	■	■				

**3.4. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh atau didapatkan secara langsung dari objek penelitian, Menurut (Sugiyono, 2010), Sumber data primer adalah sumber data yang di langsung memberikan data kepada peneliti. dalam penelitian ini yang termasuk data primer adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara kepada pihak terkait, khususnya karyawan PT B’right PLN Batam khusus nya yang menangani bagian *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* kemudian Peneliti melakukan wawancara mendalam kepada pihak-pihak terkait program CSR PT. Bright PLN Kota Batam. Kriteria informan yang dipilih peneliti adalah:

- a. Informan yang menangani langsung program CSR PT. Bright PLN Kota Batam.
- b. Informan dari pihak warga masyarakat lokal yang menerima manfaat program CSR PT. Bright PLN Kota Batam

Tabel 3. 2 Daftar Narasumber

No	Jabatan	Instansi	Jumlah
1	Manager of CSR	PLN Batam	1
2	Officer Pelaksana CSR	PLN Batam	2
3	Masyarakat Penerima CSR	Masyarakat	5

b) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data seperti dokumen, makalah, laporan kantor maupun dokumen privat seperti buku harian, surat, dan email (Creswell, 2014). Peneliti menggunakan dokumen seperti buku, foto, laporan perusahaan dan pemberitaan di media terkait implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Bright PLN Kota Batam.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2010) data skunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti misalnya lewat orang lain atau dokumen, sumber penelitian ini berasal dari buku, penelitian sbelumnya,

jurnal-jurnal penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian (Sugiyono, 2010). Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan oleh peneliti mencakup Laporan Resmi Pelaksanaan CSR yang dikeluarkan oleh PT. bright PLN Batam, Laporan Tahunan PT. bright PLN, serta jurnal penelitian terdahulu yang mendukung topik penelitian terkait program *Corporate Sosial Responsibility (CSR)*.

### **3.5. Metode Pengumpulan Data**

Peneliti menggunakan penelitian kepustakaan dalam mengumpulkan data dari buku-buku, laporan tahunan baik dari perusahaan maupun pemerintah, jurnal akademik, artikel, surat kabar, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Jenis data yang peneliti gunakan adalah data sekunder dari berbagai sumber yang kemungkinan dapat menjawab pertanyaan penelitian. Data diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain lembaga terkait yang dapat menjelaskan tentang program *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* kemudian data di olah, disajikan dan terakhir menarik Kesimpulan dalam penelitian ini memuat tentang implementasi program *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT Bright PLN Kota Batam dalam bentuk pernyataan yang mudah untuk dipahami.

### **3.6. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

Definis operasional menunjukan indikator yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian yaitu:

- a. Tepat Kebijakan, dalam penelitian ini, variable dapat terpenuhi apabila Kebijakan pelaksanaan CSR yang tersedia di PT.Bright PLN Batam dapat menjawab kebutuhan masyarakat di Kota Batam, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan dan di daerah perbatasan.
- b. Tepat Pelaksanaan, dalam penelitian ini, variable dapat terpenuhi apabila dalam proses pelaksanaannya PT. bright PLN memiliki SOP yang dapat mendukung kebijakan yang sudah ada.
- c. Tepat Target, dalam penelitian ini, variable dapat terpenuhi apabila proses pelaksanaan tepat sasaran, dimana dalam konteksnya Target yang dimaksud adalah masyarakat yang membutuhkan atau berada dalam taraf ekonomi menengah-kebawah.
- d. Tepat Lingkungan, dalam penelitian ini, variable dapat terpenuhi apabila dalam proses pelaksanaan CSR, PT. bright PLN memperhatikan lingkungan sekitar dan memastikan agar tidak ada eksternalitas yang muncul di kemudian hari.
- e. Tepat Proses, dalam penelitian ini, variable dapat terpenuhi apabila dalam pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PT. bright PLN disertai dengan pengawasan dan evaluasi untuk mengetahui tingkat ketercapaian implementasi program yang sudah dibentuk sebelumnya.

### **3.7. Metode Analisis Data**

Peneliti menggunakan teknik analisis data dengan mengumpulkan data dari buku, literatur, jurnal, data laporan kegiatan csr, peneliti sebelumnya dan sumber

lain yang relevan dengan penelitian ini. Dalam menganalisis data ada lima langkah yang peneliti lakukan dalam menganalisis data kualitatif. Pertama, peneliti mengumpulkan seluruh data skunder yang dapat diakses secara daring(*online*). Kedua, peneliti mengklasifikasikan data berdasarkan indikator-indikator yang sudah di paparkan di bab sebelumnya. Ketiga, adalah pengumpulan data primer yang dilakukan dalam mengunjungi, objek penelitian secara langsung sesuai dengan waktu peneliti yang sudah dipaparkan pada sub bab sebelumnya (lihat sub-bab 3.3). Kemudian pada tahap ke keempat peneliti akan menganalisa dan membandingkan data primer yang sudah didapatkan dengan data skunder serta indikator-indikator yang ada . Terakhir pada tahap ke-lima peneliti akan menarik hasil analisa yang kemudian akan dibuat kesimpulan dan saran.